

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Perang yang telah terjadi di Iraq telah menyebabkan Iraq berada dalam kondisi yang hancur. Hampir seluruh infrastruktur dan fasilitas umum Iraq seperti bandara, jalan raya, jembatan, gedung-gedung, pelabuhan, energi, telekomunikasi, hingga fasilitas air dan sistem sanitasi Iraq hancur akibat dampak perang. Iraq mengalami kerugian ekonomi dalam jumlah yang sangat besar.

Sebagaimana sebuah negara yang baru saja pulih dari peperangan, Iraq harus melakukan pembangunan kembali demi melanjutkan statusnya sebagai sebuah negara yang menjamin kehidupan rakyatnya. Dalam rangka rekonstruksi Iraq, Pemerintah Iraq tidak dapat melakukannya sendiri. Kerjasama dari berbagai pihak untuk mewujudkan proyek rekonstruksi ini sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, Pemerintah Iraq mengumumkan kepada dunia bahwa Iraq membuka pintu yang selebar-lebarnya kepada para investor asing maupun investor lokal untuk bekerjasama dalam proyek rekonstruksi Iraq.

Sebuah pasal dalam hukum internasional, Konvensi Jenewa IV tahun 1949, mengatur bahwa pembangunan kembali infrastruktur yang dihancurkan

dalam peperangan merupakan tanggung jawab bagi pemerintahan yang menghancurkannya. Dengan kata lain, Amerika Serikat dan koalisinya merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam proyek rekonstruksi Iraq. Dalam rangka rekonstruksi Iraq, Pemerintah Amerika Serikat meluncurkan sebuah proyek yang bernama *United States Government's Iraq Infrastructure Reconstruction Program*, sebuah program yang dikelola oleh USAID (*United States Agency for International Development*), yang bertujuan untuk melakukan rekonstruksi Iraq secara besar-besaran. Program ini menawarkan amanat kepada 15 perusahaan Amerika Serikat untuk menanam investasi dan bekerja sama dalam proyek rekonstruksi Iraq, salah satunya adalah perusahaan Wamar International.

Bagi Wamar International, proyek ini merupakan sebuah tawaran yang memiliki resiko yang cukup tinggi, khususnya dalam aspek keamanan. Sebagai sebuah Negara yang baru saja menjadi sebuah medan perang, tentu saja kondisi keamanan dalam negeri masih tidak stabil. Perpecahan yang terjadi di kelompok-kelompok masyarakat masih kerap terjadi. Terlebih lagi, masa-masa transisi pemerintahan baru sangat rentan sekali terhadap percobaan-percobaan pengambil alihan kekuasaan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi *vacuum of power* yang ada. Jalannya investasi bisa saja anjlok dan hancur sewaktu-waktu akibat stagnansi stabilitas politik dan keamanan Iraq.

Wamar International memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan jika Wamar International menyetujui untuk bergabung dalam proyek ini dan jika Wamar International menolak untuk bergabung dalam proyek ini. Situasi dalam negeri Irak yang sangat haus akan investasi membuat Irak membuka kesempatan yang selebar-lebarnya kepada para investor yang berani mengambil resiko untuk menanam investasi di Irak. Dalam rangka menciptakan atmosfer dan iklim investasi yang baik, pemerintah Irak memberikan perlakuan khusus kepada para investor melalui amandemen-amandemen pada National Investment Law yang mengatur tentang aturan-aturan investasi di Irak. Dalam amandemen tersebut, pemerintah Irak memberikan kebebasan pajak bagi perusahaan selama 10 tahun, serta memberikan izin untuk kepemilikan lahan oleh asing selama 50 tahun (dapat diperpanjang).

Keuntungan-keuntungan tersebut pun ditambah dengan potensi keuntungan yang besar dalam investasi tersebut. Harga lahan di Irak dapat terbilang sangat murah akibat situasi pasca-perang. Potensi keuntungan yang akan didapat oleh Wamar International sangatlah menggiurkan. Satu-satunya pertimbangan dan tantangan terbesar Wamar International hanyalah mengenai masalah keamanan. Namun, dengan kapabilitas Wamar International dalam segi keamanan ditambah dengan komitmen Pemerintah Irak untuk melindungi investornya, resiko tersebut pun dapat diminimalisir.

Wamar International mempertimbangkan adanya *opportunity cost* yang cukup tinggi jika harus menolak tawaran kerjasama tersebut. Dengan menggunakan teori Business of Peace oleh Jane Nelson serta teori Penanaman Modal Asing oleh David K. Eitemen, dimasukkan kedalam proses pertimbangan menurut teori Model Aktor Rasional menurut Graham T. Allison, terlihat bahwa Wamar International akan mendapatkan keuntungan lebih daripada kerugian jika Wamar International menyetujui proyek *US Government Infrastructure Reconstruction Program* ini. Melihat pertimbangan tersebut, Wamar International pun memutuskan untuk bergabung dalam proyek *US Government's Infrastructure Reconstruction Program* dan menanam investasi dalam skala besar di Irak.